BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Banyaknya penggunaan jumlah kendaraan pribadi, kendaraan umum dan kendaraan tidak layak jalan, serta banyaknya sektor industri yang menyebabkan banyaknya limbah oli atau oli bekas sehingga mengakibatkan pencemaran dan berbagai dampak buruk lainnya terhadap lingkungan. Bertambahnya kebutuhan minyak bumi maka dapat menimbulkan peningkatan eksplorasi dan pengolahannya.

Oli bekas adalah limbah oli yang sudah tidak terpakai dan mengandung beberapa zat - zat berbahaya yang dapat mencemari lingkungan. Adapun pencemaran yang disebabkan oleh limbah tersebut antara lain yaitu pencemaran air, mengakibatkan kerusakan struktur tanah, dan hilangnya unsur hara. Menurut karakteristiknya, oli bekas ini termasuk zat yang berbahaya dan beracun karena mudah terbakar, dapat meledak, dan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

Menurut klasifikasinya, berdasarkan pada pasal 3 Ayat (2) Huruf b PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, oli bekas termasuk golongan 2 , Kode: B105d, yaitu kategori limbah yang mengandung B3, memberi efek tidak langsung dan berdampak buruk terhadap manusia dan lingkungan hidup.

Berdasarkan UU Lingkungan Hidup, oli bekas dapat dimanfaatkan apabila dalam pengelolaannya dikelola secara tepat. Menurut PP Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, oli bekas termasuk limbah B3 dari sumber yang tidak spesifik.

Pengolahan limbah ini bertujuan agar kedepannya tidak dapat menyebabkan kerusakan lingkungan bagi masyarakat. Mengingat akan bahayanya maka dari itu dalam prosesnya perlu pengawasan ketat menggunakan sistem manifes, untuk menjaga kelestarian lingkungan dari dampak limbah B3.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 pasal 13 dan 14 terkait Pemda mengatur kewenangan daerah dalam pengendalian lingkungan hidup, setelah diterbitkan tertanggal 28 Juli 2008 berupa Surat Edaran Nomor: 660.2/2176/SJ oleh Kementerian Lingkungan hidup tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Undang - undang yang mengatur pengelolaan limbah B3 tersebut antara lain:

1. No. KEP-03/ BAPEDAL/ 09/ 1995 terkait Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
2. PP No. 18 Tahun 1999 juncto PP No. 85 Tahun 1999 terkait Pengelolaan Limbah B3
3. Permen No. 18 Tahun 2009 terkait Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
4. Undang - Undang 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 terkait Izin Lingkungan.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 terkait Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
7. PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3

Undang - undang yang terkait pengelolaan limbah B3 ini, bertujuan untuk mengurangi tindak pelanggaran dan mengatur agar pengolahannya sesuai dengan undang - undang berlaku. Berbagai aktivitas industri menyebabkan pencemaran seperti adanya aktifitas pembuangan ke sistem perairan, yang sesungguhnya peraturan perundangan melarang hal tersebut. Pembiayaan cukup mahal sebagai alasan membuang limbah dengan mudah dibuang secara sembarangan. Namun, masih banyak pelaku usaha kurang menyadari bahwa limbah yang dihasilkan termasuk dalam golongan limbah B3. Setiap pelaku usaha dan segala aktivitas industri apapun yang berkaitan dengan lingkungan hidup harus memperoleh izin dan dianalisa terlebih dahulu sebagai syarat utama dalam melakukan suatu kegiatan usaha.

Berpedoman pada perundangan Limbah B3 yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan temuan yang ada, Adapun permasalahan lingkungan hidup yaitu:

1. Pertanggung jawaban terhadap pemilik limbah berkaitan dengan limbah B3 yang tidak dikelola secara tepat
2. Pembuangan Limbah B3 tanpa izin resmi
3. Kurangnya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan limbah B3 sehingga menimbulkan korban
4. Adanya kegiatan ilegal tetapi tidak ada tindakan tegas dari pihak berwenang

Salah satu pelanggaran pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun dikawasan militer Lantamal V Surabaya. Limbah yang dihasilkan di kawasan tersebut terdiri dari oli bekas dan sisa bahan bakar minyak (BBM).

Limbah tersebut dari sisa - sisa pemakaian dari kapal - kapal milik tentara nasional Indonesia yang bersandar di Lantamal V Surabaya. Limbah B3 tersebut tidak ada izin pengelolaan dari Menteri Negara Lingkungan Hidup dan pengelolaannya tidak berpedoman pada undang - undang yang berlaku, yang bisa mencemari lingkungan hidup.

Adapun dugaan pelanggaran di Pangkalan Utama Angkatan Laut V, limbah B3 yang dihasilkan oli bekas dan sisa - sisa bahan bakar minyak (BBM), tidak adanya izin pengolahan oli bekas yang dikategorikan limbah B3 yang meliputi, yaitu izin pengumpulan dan pemanfaatan.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam perkara No. 10-K/PM.III-12/AL/I/2020 tentang berniaga limbah oli bekas di Pengadilan Militer III - 12 Surabaya?
2. Bagaimana analisa kasus putusan hakim No. 10-K/PM.III-12/AL/I/ 2020 di Pengadilan Militer III - 12 Surabaya?

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tesis ini antara lain:

1. Menganalisis dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan khususnya masyarakat yang rumahnya berdekatan di sekitar wilayah militer dari kegiatan ilegal ini.
2. Untuk menganalisa sanksi hukum baik pidana maupun sanksi administrasi terkait limbah B3 di wilayah militer.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diupayakan dapat menambah kemajuan ilmu hukum di sektor industri, dalam pengembangan wawasan ke depannya khususnya penegakan hukum yang terkait dalam permasalahan pengelolaan limbah B3, sehingga dalam penerapannya menimbulkan rasa jera kepada terdakwa dan membuat masyarakat tidak ingin melakukan kegiatan ilegal tersebut.

2. Manfaat praktis

- a) Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan kepada peneliti terkait penegakan hukum yang terkait dalam permasalahan pengelolaan limbah B3.
- b) Diharapkan ke depannya dapat digunakan sebagai acuan peneliti selanjutnya dengan pembahasan berbeda.

1.4. Kajian Teoritis

1. Teori Hukum Lingkungan

Dalam UU No. 23 Tahun 1997 terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup, teori *strict liability* ini pertama kali di perkenalkan dalam hukum Indonesia kemudian digantikan dengan UU No. 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Menurut Takdir Rahmadi, berpendapat tentang hukum lingkungan yaitu disiplin ilmu hukum yang menjelaskan tentang aturan, pemanfaatan, perlindungan

terhadap lingkungan hidup. Menurut pendapat lainnya, Abdulrahman berpendapat tentang hukum lingkungan yaitu hukum mengatur lingkungan hidup”.¹

Oleh sebab itu, sumber daya alam merupakan bagian dari lingkungan hidup maka tetap menjaga kelestariannya. Di sektor industri, hukum tersebut berfungsi untuk menjaga agar kedepannya dapat menunjang bagi kesejahteraan dan mutu hidupnya.²

2. Kerangka Konseptual

Konseptual Lingkungan Hidup bertujuan untuk mengatur kesadaran masyarakat, melindungi dan memelihara lingkungan hidup agar tidak tercemar limbah B3.

Koesnadi Hardjasoemantri, berpendapat bahwa: “hukum lingkungan adalah instrumentarium yuridis. Dalam hal ini, pengelolaan lingkungan dilakukan oleh pemerintah, sehingga hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan yang memuat ketentuan dalam pengelolaan lingkungan hidup”.³

Dalam pasal 1 angka UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH menyatakan bahwa: “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain

Secara garis besarnya, lingkungan hidup terdiri dari beberapa golongan sebagai berikut:

¹ Muhammad Taufik Makarao, 2004, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan*, Gramedia, Jakarta, h. 29

² Abdurrahman, 1990, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, h. 3

³ Fuad Amsyari, 1977, *Prinsip Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 11-12

- a) Lingkungan fisik (*physical environment*)
merupakan segala sesuatu yang terdapat di sekitar kita berupa benda mati.
- b) Lingkungan biologis (*biological environment*)
merupakan segala sesuatu terdapat di sekitar kita berupa makhluk hidup.
- c) Lingkungan sosial (*social environment*)
merupakan manusia lain yang berada di sekitarnya kita.⁴

3. Konsep Baku Mutu Lingkungan Hidup

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 angka 13 mengenai PPLH, menyatakan bahwa: “ Konsep Baku Mutu Lingkungan Hidup yaitu batas jumlah makhluk hidup, zat / komponen yang ada dan adanya unsur pencemar yang berpengaruh sebagai unsur lingkungan hidup terhadap suatu sumber daya tertentu.”

1.5. Metode Penelitian

Pada penelitian tesis ini, menitik beratkan pada permasalahan dan penegakan hukum terkait pengelolaan limbah B3.

1. Metode Pendekatan

Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitik beratkan ada meneliti Undang - Undang yang berlaku dan penerapannya peraturan mengenai pengelolaan limbah B3.

2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer, di dapat dari:

⁴ Harun M. Husein, 1992, *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 189-190

- 1) Undang - Undang Dasar 1945
 - 2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
 - 3) No: KEP-03/BAPEDAL/09/1995 terkait Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 - 4) PP No.18 Tahun 1999 juncto PP No. 85 Tahun 1999 terkait Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 - 5) PermenLH No. 03/ 2008 terkait Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 - 6) UU No. 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
 - 7) PermenLH No. 5 Tahun 2012 terkait Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
 - 8) PP No. 101 Tahun 2014 terkait Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan data dokumen - dokumen hukum, buku, jurnal, makalah.
- c. Bahan Hukum Tersier, data diperoleh melalui kamus, ensiklopedi, dan data yang sejenis yang berguna untuk mendukung data primer dan data sekunder.

3. Analisis Data

Analisa data dilakukan menggunakan yuridis normatif merupakan analisa penulis berdasarkan pada undang - undang yang berlaku agar menemukan kasus tertentu. Teknik penarikan kesimpulan data yang telah dikumpulkan termasuk data-

data di Lantamal V Surabaya, UU tentang pengolahan limbah B3 dan putusan dari pengadilan diolah berdasarkan rumusan permasalahan.

1.6. Sistematika Penulisan Tesis

Dari berbagai uraian diatas untuk mempermudah pembahasan pada tesis ini maka peneliti membuat sistematika sebagai berikut:

Bab I: merupakan pendahuluan yakni terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab II: membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 10-K/PM.III-12/AL/I/2020 limbah B3 (oli bekas) di Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Bab III: merupakan pokok pembahasan dari analisa tesis, oleh karenanya, bab ini membahas tentang analisa kasus putusan hakim No.10-K/PM.III-12/AL/I/ 2020 di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Bab IV: merupakan penutup yaitu berisi kesimpulan keseluruhan pembahasan serta saran atas hasil dari penelitian yang menjadi masukan penelitian selanjutnya.